

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	12
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Deskripsi Konseptual	14
1. Belanja Modal (Y)	14
2. Pendapatan Asli Daerah (X1)	16

3. Dana Alokasi Umum (X2)	19
4. Dana Alokasi Khusus (X3)	22
B. Hasil Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Teoritik	26
D. Perumusan Hipotesis Penelitian	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	33
B. Objek, Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Metode Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Operasional Variabel Penelitian	38
F. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	50
B. Pengujian Hipotesis	61
C. Pembahasan	76

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Implikasi	89
C. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	96
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120
-----------------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Pengambilan Data Penelitian	96
Lampiran 2	Surat Balasan Dari Kementerian Keuangan RI	97
Lampiran 3	Data Penelitian	98
Lampiran 4	Perhitungan Grafik Histogram Variabel X1 (PAD)	102
Lampiran 5	Perhitungan Grafik Histogram Variabel X2 (DAU)	103
Lampiran 6	Perhitungan Grafik Histogram Variabel X3 (DAK)	104
Lampiran 7	Perhitungan Grafik Histogram Variabel Y (BM)	105
Lampiran 8	Analisis Statistik Deskriptif	106
Lampiran 9	Uji Normalitas	107
Lampiran 10	Uji Asumsi Klasik	108
Lampiran 11	Analisis Regresi Linear Berganda	109
Lampiran 12	Uji Koefisien Korelasi	110
Lampiran 13	Uji Koefisien Determinasi	111
Lampiran 14	Titik Presentasi Distribusi F	112
Lampiran 15	Titik Persentase Distribusi T	114
Lampiran 16	Tabel Issac	116
Lampiran 17	Tabel Durbin-Watson	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
I.1	Data Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015	9
III.1	Data kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	37
IV.1	Statistik Deskriptif	51
IV.2	Distribusi Frekuensi Pendapatan Asli Daerah	53
IV.3	Distribusi Frekuensi Dana Alokasi Umum	55
IV.4	Distribusi Frekuensi Dana Alokasi Khusus	57
IV.5	Distribusi Frekuensi Belanja Modal	60
IV.6	Uji Kolmogorov-Smirnov	62
IV.7	Uji Multikolinieritas	64
IV.8	Uji Autokorelasi Durbin-Watson	66
IV.9	Uji Glejser	67
IV.10	Hasil Uji Regresi Berganda	68
IV.11	Uji t	69
IV.12	Uji F	71
IV.13	Uji Korelasi Simultan	72
IV.14	Uji Korelasi Parsial PAD terhadap Belanja Modal.....	73

IV.15	Uji Korelasi Parsial DAU terhadap Belanja Modal	74
IV.16	Uji Korelasi Parsial DAK terhadap Belanja Modal	75
IV.17	Uji Koefisien Determinasi	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
III.1	Konstelasi Penelitian	36
IV.1	Grafik Histogram Pendapatan Asli Daerah	53
IV.2	Grafik Histogram Dana Alokasi Umum	56
IV.3	Grafik Histogram Dana Alokasi Khusus	58
IV.4	Grafik Histogram Belanja Modal	60
IV.5	Grafik Normal P-P Plot	63
IV.6	Interpretasi Tabel DW	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berjalan 17 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif berlaku per Januari tahun 2001. Undang-Undang tersebut dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, “Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹. Hal ini menandai dimulainya era pembangunan secara mandiri. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah